

PERJANJIAN KINERJA ESELON III



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHMUD,S.Sos, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM


MAHMUD,S.Sos, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKERTARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja sekteriat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	100%
		Persentase capaian realisasi keuangan	80%
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sesuai ketentuan	4
2	Tersedianya laporan keuangan yang sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun Sesuai ketentuan	1
3	Terlaksananya monitoring kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring	4
4	Tersedianya perangkat kerja pegawai	Persentase perangkat kerja dalam kondisi baik	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.830.200,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 62.321.721.101,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 227.170.000,-

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 884.881.300,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 32.245.500,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 102.733.240,-
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 163.377.148,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 63.798.958.489,-

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



1. ABD. KARIM DANIA, SE, MM
Nip : 196412311996031012

Sekretaris,

MAHMUD, S.Sos, MM
Nip : 197607191998031003

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Meningkatnya kinerja sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya hasil kerja urusan sekretariat meliputi administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Indikator Program :				
1	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	Pegawai dengan predikat baik menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah mencapai kinerja sesuai target dan berperilaku baik.	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang predikat baik} \times 100}{\text{Jumlah pegawai yang ada}}$	Subag Kepegawaian
2	Persentase capaian realisasi keuangan	Capaian realisasi keuangan menunjukkan kebersihan pelaksanaan seluruh program yang telah direncanakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran} \times 100}{\text{Total pagu}}$	Laporan SPJ BPKD
3	Persentase capaian kinerja organisasi	Capaian kinerja organisasi merupakan hasil dari pelaksanaan terhadap seluruh program. Indikator ini menunjang kinerja sekretariat dikarenakan, sekretariat melakukan monitoring kinerja pegawai setiap tiga bulan.	rata-rata dari capaian sasaran kinerja (SKP) BPKD	Laporan SKP pegawai BPKD

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian SKP tahun 2023. Capaian SKP pegawai dengan predikat baik sebesar 100%.
Persentase capaian realisasi keuangan	80%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 80%. Target ini ditetapkan lebih besar dari capaian tahun 2023. Capaian realisasi keuangan Tahun 2023 sebesar 79,55.%



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl.Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A.YASSER CIPTA NUR,S.SOS.,MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

Pihak Pertama,

A.YASSER CIPTA NUR,S.SOS.,MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Optimalisasi penerbitan SP2D	Persentase pengajuan SPM Perangkat Daerah yang di terbitkan SP2D nya	persen (%)	100,00
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten	Jumlah orang yang memahami penatausahaan keuangan	Orang	80
2.	Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan	Jumlah dokumen penerbitan SP2D	SP2D	8000
3.	Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan	Dokumen	8000

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. . 508.880.300
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 508.880.300,-
Total Anggaran		Rp. . 508.880.300

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM
Nip : 196412311996031012

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah,

A. YASSER CIPTA NUR, S.Sos., MM
Nip : 197605021998031005

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

Penjelasan Kinerja

Optimalisasi penerbitan SP2D

Yang dimaksud dengan sasaran tersebut adalah upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akuntabilitas proses pencairan dana dari kas daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pihak lain yang berhak.

Uraian Sasaran Kegiatan ::

1. Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten
2. Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan
3. Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan administrasi penatausahaan Keuangan Daerah .

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Persentase pengajuan SPM Perangkat Daerah yang di terbitkan SP2D nya	SP2D yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah target dokumen penatausahaan triwulan}}$	Jumlah Laporan SP2D yang terealisasi
1.	Indikator Kegiatan Jumlah orang yang memahami penatausahaan keuangan	Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan pemerintah daerah semakin beradaptasi dengan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat	Jumlah pengelolah keuangan SKPD	Bidang perbendaharaan dan kas daerah
2.	Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen penerbitan SP2D	Proses pencairan anggaran belanja SKPD sesuai aturan perundang-undangan akan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan	Bidang perbendaharaan dan kas daerah

3.	Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan	Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan aliran kas diharapkan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Rekon	Berita acara rekon
<p>Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:</p>				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN		
Indikator Program Optimalisasi penerbitan SP2D	100 %	Target Persentase realisasi SKPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan sesuai ketentuan berdasarkan histori tahun sebelumnya bahwa capaian tahun 2023 sebesar 119%		
Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi	80 orang	Target SDM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi masih 80 orang seperti tahun sebelumnya yang terdiri dari PPK dan Bendahra pengeluaran 54 SKPD		
Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan SP2D	8.000 SP2D	Target penerbitan SP2D untuh tahun 2024 sebanyak 8.000 SP2D karena berdasarkan dari histori capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 realisasi sebanyak 8.900 SP2D dari target 7.500 SP2D		
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan secara berkala	8.000 Dokumen	Target dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan sebanyak 8.000 dokumen karena berdasarkan dari histori capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 realisasi sebanyak 8.900 dokumen dari target 7.500 dokumen.		



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl.Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMIL WIRIADINATA,SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

EMIL WIRIADINATA,SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Dokumen penganggaran perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dengan dokumen penganggaran Perangkat Daerah	Persen (%)	100
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Jumlah regulasi yang disusun	dokumen	18
2	Tersediannya dokumen anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah yang diverifikasi	dokumen	222

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 805.122.493,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 805.122.493,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 805.122.493,-

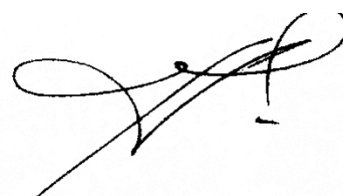
Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

Kepala Bidang Anggaran ,



EMIL WIRIADINATA, SE

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Dokumen penganggaran perangkat daerah yang berkualitas :

Yang dimaksud dengan sasaran ini adalah dokumen yang akurat, lengkap, terstruktur, mudah dipahami, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran
2. Tersedianya dokumen anggaran perangkat daerah.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Anggaran

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Indikator Program :				
1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah telah menggambarkan dokumen penganggaran yang berkualitas dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah.	$\frac{\text{Jumlah dok. Perencanaan yang sesuai dengan penganggaran}}{\text{Jumlah Keseluruhan dok.perencanaan dan penganggaran}} \times 100$	Subid penyusunan APBD
2	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Regulasi dan kebijakan anggaran merupakan acuan dalam Menyusun perencanaan dan anggaran perangkat daerah sehingga kualitas perencanaan optimal	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Subid penyusunan APBD
Indikator Kegiatan :				
1	Jumlah regulasi yang disusun	Regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Subid penyusunan APBD
2	Jumlah Dokumen Perencanaan & anggaran yang diselesaikan	Dokumen Perencanaan & anggaran yang diselesaikan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Subid penyusunan APBD

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	100%	Dokumen perencanaan anggaran SKPD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangatlah penting untuk diselesaikan tepat waktu agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi tepat waktu serta pelayanan public terlaksana dengan baik.
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	18 dokumen	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran merupakan surat Keputusan kepala daerah ataupun sekretaris daerah tentang perubahan anggaran pada SKPD yang meliputi adanya pergeseran anggaran dalam ruang lingkup SKPD yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl.Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF,SE,MM**

Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM


YUSUF,SE,MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Jumlah dokumen LKPD sesuai SAP	dokumen	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	2
2.	Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Dokumen	12
3.	Tersedianya laporan mutasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Laporan	47

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 458.188.800,00-
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 458.188.800,00,-
Total Anggaran		Rp. 458.188.800,00,-

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Bidang Aset Daerah,

Kepala Badan



H.ABD. KARIM DANIA,SE,MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199603 1 012

YUSUF,SE.MM
Pangkat: Penata Tk.I
Nip : 19740901 200701 1 016

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Yang dimaksud dengan sasaran ini adalah penyajian informasi keuangan daerah yang transparan, lengkap dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan Para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keuangan daerah dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Masyarakat.

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah
2. Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan
3. Tersediaanya laporan mutasi Barang Milik Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

- 1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelapran Barang Milik Daerah;
- 5.Peraturan Daerah Nomot 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Jumlah dokumen LKPD sesuai SAP	Dalam pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan maka pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan	Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 77 Tahun Anggaran 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP No. 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Bidang asset
1.	Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Harga yang disusun oleh perangkat daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan KUA/PPAS	Jumlah dokumen, perencanaan barang milik daerah yang di susun.	Usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
2.	Indikator Kegiatan:Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Penatausahaan Aset	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun.	Hasil rekonsiliasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3.	Indikator Kegiatan: Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	Percepatan dokumen terkait pemindahatangan dan penghapusan dari OPD terkait	Jumlah dokumen pemindahtanganan, penghapusan ,pemanfaatan yang diselesaikan	Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi dari OPD terkait.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	90 %	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tetric yaitu pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan memastikan bahwa aset daerah digunakan secara optimal dan akuntabel.

<p>Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>Dokumen Standar Harga yang disusun oleh perangkat daerah kedalam peraturan bupati yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan KUA/PPAS.</p>
<p>Indikator Kegiatan : Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah tercapai setelah dilaksanakan rekonsiliasi atas pengandaan barang milik daerah pada pengguna barang.</p>
<p>Indikator Kegiatan : Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah</p>	<p>47 Laporan</p>	<p>Percepatan dokumen terkait pemindahatangan dan penghapusan dari OPD disajikan atas pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah baik secara fisik maupun administrasi.</p>



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl.Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAMADHANI UTAMY MUCHTAR,S.STP,M.SI**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

RAMADHANI UTAMY MUCHTAR,S.STP,M.SI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dokumen	1 Dokumen
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya SDM Penyusun LKPD	Jumlah SDM yang memahami pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	Orang	80
2.	Tersedianya LKPD audeted	Jumlah laporan keuangan	Laporan	7

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 368.820.300.
1	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 368.820.300.
Total Anggaran		Rp. 368.820.300.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

Kepala Bidang Akuntansi



RAMDHANI UTAMY MUHTAR, S.STP, M.Si

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel :

Yang dimaksud dengan sasaran ini adalah penyajian informasi keuangan daerah yang transparan, lengkap dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keuangan daerah dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Masyarakat..

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersedianya SDM penyusun LKPD
2. Tersedianya LKPD audited

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dalam pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan maka pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan	Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 77 Tahun Anggaran 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP No. 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Bidang Akuntansi
1	Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang memahami pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Penyusun Laporan Pertanggungjawaban LKPD berdasarkan jumlah SKPD	Bidang Akuntansi
2	Indikator Kegiatan Jumlah laporan keuangan	Laporan keuangan yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian interen yang memadai	7 Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Tersusunnya LKPD sesuai SAP	1 Dokumen	Pencapaian target diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

		membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
<p>Indikator Kegiatan</p> <p>Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban</p>	80 Orang	Jumlah SDM yang dibina dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban dicapai dengan diadakannya pelaksanaan pelatihan maupun bimbingan teknis sebelum penyusunan laporan dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas SDM sehingga laporan yang disusun akuntabel, akurat, dan handal.
<p>Indikator Kegiatan</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan dikonsolidasikan</p>	7 laporan	Capaian target ketepatan akuntansi pelaporan keuangan daerah yaitu kesesuaian antara dokumen rekonsiliasi dengan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.